KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dua Dirjen mundur bareng, Komisi V minta kinerja Kemen-PU tetap solid
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dua Dirjen Mundur Bareng

Komisi V Minta Kinerja Kemen-PU Tetap Solid



FOTO: WEB PKB

Syafiuddin Asmoro

ANGGOTA Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro menyoroti pengunduran diri dua pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yakni Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi internal dan tidak mengganggu kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.

"Kami menghormati keputusan yang telah diambil. Yang terpenting, tidak boleh menggangu kinerja Kementerian PU dalam menjalankan program-program strategis nasional," ujar Syafiuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Syafiuddin berharap seluruh jajaran Kementerian PU tetap kompak dan solid dalam melaksanakan tugas, terutama dalam memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan target yang ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, dia meminta Menteri PU segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga merugikan negara hingga Rp 3 triliun. "Harus segera ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Menteri PU juga perlu memastikan persoalan ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, penyelesaian yang cepat dan tuntas akan menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian PU, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional.

Untuk itu, ia meminta agar proses evaluasi internal dilakukan secara menyeluruh guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. Sebab semua pihak ingin pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari penyimpangan. "Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," tandasnya.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal pengunduran diri dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya. Hal ini terjadi karena adanya indikasi kerugian negara di Kementerian PU yang diungkapkan oleh BPK.

Awal mulanya, Dody mengaku menerima surat dari BPK sebanyak dua kali terkait temuan kerugian keuangan negara di kementeriannya. Surat pertama dikirim pada Januari 2025 dan surat kedua dikirim Agustus 2025. "Yang Januari 2025, kalau enggak salah di situ dicantumkan kerugian keuangan negara hampir Rp 3 triliun," ungkap Dody, Senin (2/3/2026).

Atas surat tersebut, kemudian ia memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk menindaklanjuti dengan target penyelesaian hingga Juni 2025. Namun penyelesaian ini tak terwujud. Selanjutnya, surat cinta kedua dari BPK meluncur di Agustus 2025. "Di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun, dari awalnya hampir Rp 3 triliun, menjadi sekitar hampir Rp 1 triliun," kata Dody

Atas temuan itu, Dody dan jajarannya membentuk tim ad-hoc di setiap Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Namun lagi-lagi, tidak ada tindak lanjut dari Irjen maupun Sekjen. "Makanya kemudian saya ambil alih, kita akan membentuk tim baru di setiap Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat," tandasnya. ■ TIF